

**EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
KABUPATEN DI KABUPATEN KENDAL**

**(Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Desa Cening,
Kecamatan Singorojo)**

Brilliant Nauval Haqiqi

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50275. Telepon (024) 7465407

Faksimile (024) 7465405

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> , email: fisip@undip.ac.id

brilliantnh9@gmail.com

ABSTRACT

Infrastructure development is an important thing that is carried out for the smooth running of the national or regional development process. One of the infrastructures that is the concern of the government is the road, because the infrastructure can encourage the smooth mobility of people, goods, and services. Kendal Regency government is addressing the problems of road infrastructure development in the region, especially district roads. One of the problematic kabupaten roads in Kendal Regency is in Cening Village, Singorojo District because it has been damaged for 35 years.

The research method used by the researcher in carrying out this research is qualitatively descriptive, with data collection in the form of interviews, observations, and documentation. Researchers use qualitative methods because they want to find out and analyze in depth related to how Development Management, inhibiting factors, and solutions to complete the existing district roads in Cening village, where the road section has long been in a damaged condition. The main speakers in this study were the Public Works and Spatial Planning Office of Kendal Regency and the Cening village government.

This study uses the management theory of George R. Terry that includes planning, organizing, executing, and supervising. The concept is used in the process of development of district road infrastructure in Cening Village. However, in the process of road construction, there are several obstacle factors that will be evaluated using the concept of Bridgman & Davis with indicators in the form of inputs, processes, outputs, and outcomes.

On the other hand, the Regency Road in Cening village has not been completely built one hundred percent, but still leaves the Cening-Kaliputih road section which is still in a badly damaged condition. Therefore, the Cening village government felt the need to report back and inquire about the news of the certainty of the construction of the Cening-Kaliputih road to the relevant parties. Furthermore, the Kendal Regency government through the

Kendal Regency DPUPR must also be able to solve the problem of damaged roads in Kendal Regency in general and Cening village in particular.

Keywords: infrastructure development, Regency Road, Cening Village, Kendal Regency

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebijakan publik dapat diketahui sebagai rangkaian rencana, aktivitas, sikap, program yang akan diambil maupun tidak diambil oleh para pemangku kepentingan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah merupakan suatu keputusan-keputusan yang penting karena pada pelaksanaannya akan mengikat untuk kehidupan masyarakat luas. Kebijakan publik secara lebih lanjut dapat dianggap sebagai suatu bentuk pelayanan publik yang dijalankan oleh negara guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satunya melalui kebijakan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur.

Tentunya pemerintah daerah menginginkan adanya kemajuan pembangunan di daerahnya. Pemerintah Kabupaten Kendal saat ini sedang gencar untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur kepada daerah-daerah yang masih memiliki kendala ketertinggalan infrastruktur, salah satunya yaitu infrastruktur jalan. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten, pemerintah daerah berupaya untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan infrastruktur jalan yang belum terbangun dengan baik di beberapa daerah di Kabupaten Kendal. Pembangunan infrastruktur jalan juga menjadi bagian

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal tahun 2021-2026. Hal ini tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Pembangunan infrastruktur yang ada di suatu daerah akan membantu daerah untuk dapat tumbuh. Hal ini dikarenakan melalui pembangunan infrastruktur akan punya pengaruh yang penting kepada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, peningkatan kemakmuran dan terwujudnya stabilitas makro ekonomi (Haris, 2009). Pembangunan infrastruktur jalan menjadi suatu hal yang sangat esensial dan perlu dilakukan untuk mendukung proses tumbuhnya ekonomi di suatu daerah. Melalui optimalisasi pembangunan infrastruktur jalan akan membantu kehidupan masyarakat dalam aktivitas perekonomian sehari-hari. Laju pertumbuhan ekonomi serta investasi di suatu daerah tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Apabila suatu daerah tidak mempunyai akses infrastruktur jalan yang baik, ini akan berdampak kepada aktivitas-aktivitas masyarakatnya. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung jalan sudah menjadi urat nadi dalam kehidupan

masyarakat yang menggerakkan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. Akses jalan yang buruk akan membuat daerah menjadi terisolir, hal ini dikarenakan daerah tersebut tidak dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat luar karena keterbatasan akses yang ada. Dengan keadaan yang demikian aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat akan terganggu dan tidak dapat berjalan dengan lancar. Potensi desa dengan kondisi yang demikian untuk berkembang mengalami hambatan karena lokasinya yang terisolir sehingga berdampak pada kurangnya sarana umum dan jauh dari pusat pertumbuhan dengan begitu sulit mendapatkan akses ke pasar (Syahza, 2002). Masyarakat yang tinggal di daerah dengan kondisi tersebut pun harus melakukan usaha yang lebih untuk menjangkau fasilitas-fasilitas pelayanan publik seperti untuk menuju rumah sakit, sekolah, pasar terdekat. Sehingga masalah-masalah itu menyebabkan tingkat keterisolasian masyarakat desa dari akses pendidikan, ekonomi dan kesehatan masih relatif tinggi (Darmawan, 2018). Dengan kondisi yang demikian, mobilitas masyarakat mengalami keterhambatan. Kondisi akses jalan yang sulit akan juga berdampak kepada kesejahteraan dan taraf hidup masyarakatnya. Maka dari itu tersedianya sarana dan prasarana transportasi sangat penting guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah desa terisolir (Darmawan, 2018).

Pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di beberapa wilayah Kabupaten Kendal masih belum sesuai dengan rencana yang diharapkan. Proses perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Kendal pada tahun 2021 masih tersisa 100 Km dari

keseluruhan jalan kabupaten sepanjang 770 Km. Pada tahun 2021, proses perbaikan jalan rusak yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal hanya hanya mampu menyelesaikan sepanjang 6 Km jalan (Prayitno, 2021). Dengan kondisi yang demikian maka baru sekitar 88 persen dari keseluruhan 770 Km panjang jalan Kabupaten Kendal yang telah dibangun dengan keadaan yang baik. Pemerintah Kabupaten Kendal masih memiliki pekerjaan rumah untuk menuntaskan 12 persen pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Kendal dengan segala keterbatasan yang menyertai. Tentunya hal tersebut sudah harus menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Kendal untuk segera diselesaikan masalahnya.

Salah satu daerah di Kabupaten Kendal yang masih mengalami ketertinggalan pembangunan infrastruktur yaitu Desa Cening, Kecamatan Singorojo. Masalah infrastruktur jalan masih menjadi masalah yang mendasar di daerah ini. Jalan yang menjadi penghubung antara Kecamatan Limbangan dan Kecamatan Singorojo sepanjang 6 Km ini sudah selama 35 tahun dalam kondisi rusak berat. Jalan di desa tersebut merupakan jalan batu sehingga kondisinya akan seperti sungai kering pada saat musim kemarau, namun di saat musim hujan jalan tersebut akan terputus aksesnya karena genangan lumpur. Di sisi lain, jalan tersebut juga menjadi akses satu-satunya untuk menuju ke Desa Cening. Kondisi yang demikian seharusnya patut untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah sejak lama, agar masyarakat Desa Cening dapat beraktivitas dengan lancar. Akan tetapi yang terjadi tidak demikian. Sudah berkali-kali

pergantian kepemimpinan Bupati di Kabupaten Kendal namun kondisi jalan di Desa Cening masih menyisakan permasalahan tersendiri. Kondisi yang demikian tentunya menghambat produktivitas masyarakat di Desa Cening dalam aktivitas kesehariannya, seperti untuk berangkat bekerja, berbelanja ke pasar, mengakses fasilitas pelayanan publik, dan lain sebagainya.

. Perbaikan ruas jalan menuju Desa Cening ini baru dilanjutkan kembali perbaikannya pada tahun 2022 di masa kepemimpinan Dico Ganinduto. Dengan adanya masalah tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat selisih waktu yang relatif panjang dalam proses perbaikan ruas jalan menuju Desa Cening yang mulanya ditargetkan selesai pada tahun 2020 namun baru dilanjutkan kembali proses perbaikannya pada tahun 2022. Oleh karena itu terdapat penantian yang cukup lama kurang lebih selama 35 tahun bagi masyarakat Desa Cening untuk dapat melihat realisasi pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cening yang sudah lama mengalami kerusakan parah.

Tujuan Penelitian

Melalui hal tersebut tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana manajemen pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Desa Cening.
2. Untuk menjelaskan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Desa Cening, Kabupaten Kendal dan solusi dalam menyelesaikan hambatan tersebut.

Kerangka Teori

a. Pembangunan Infrastruktur

Arti dari infrastruktur merujuk pada Grigg (1988) adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, drainase, pengairan, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial ataupun kebutuhan ekonomi. Infrastruktur tersebut apabila dikaitkan menjadi satu sistem maka akan menjadi bagian-bagian yang tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain.

Infrastruktur menurut Larimer (dalam Suriani dan Keusuma, 2015) diartikan sebagai rancangan kerja atau pondasi yang mendasari pada pelayanan pokok, fasilitas, dan institusi yang mana hal tersebut bergantung kepada pertumbuhan dan pembangunan dari suatu wilayah, komunitas, dan sistem. Dalam *The Routledge Dictionary of Economics* (1995) mendefinisikan bahwa infrastruktur adalah pelayanan utama dari suatu negara yang mendukung aktivitas ekonomi dan aktivitas masyarakat sehingga bisa berjalan melalui penyediaan transportasi ataupun fasilitas pendukung yang lain.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hal yang penting untuk dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan bahwa infrastruktur menjadi suatu penentu utama berlangsungnya kegiatan pembangunan, termasuk untuk

mencapai target pembangunan kualitatif maupun kuantitatif (Marzuki, 2007). Dalam jangka pendek pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja di dalam sektor konstruksi, pada jangka menengah dan panjang akan mempengaruhi peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi terkait. Dengan itu pembangunan infrastruktur bisa dikatakan menjadi langkah untuk merangsang peningkatan output ekonomi, penyelesaian masalah kemiskinan, peningkatan kualitas masyarakat, serta peningkatan kelancaran perpindahan barang dan jasa (Kusuma, 2019).

b. Manajemen Pembangunan

Siagian (2005) mendefinisikan manajemen pembangunan merupakan rangkaian atau upaya pertumbuhan yang direncanakan dan upaya perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka menuju modernitas dalam pembangunan negara. Sedangkan Tjokroamidjogo (1995) mengemukakan bahwa manajemen pembangunan merupakan proses kontrol dari pemerintah terhadap bisnis (administrasi) dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang direncanakan ke arah yang dianggap lebih maju dan lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa.

Manajemen pembangunan seharusnya mampu untuk mengoptimalkan modal pembangunan di suatu wilayah dan

mengelola hal tersebut guna mewujudkan kesejahteraan ke arah yang lebih baik (Saksono, 2019). Namun belum keseluruhan pemangku kepentingan dalam pembangunan mempunyai pemahaman dan kapabilitas dalam mengelola modal pembangunan yang ada di daerahnya. Dengan begitu terkadang pengelolaan perencanaan pembangunan daerah masih berjalan secara konvensional dan belum beracuan kepada hasil penelitian, pengembangan, inovasi, dan desain.

Menurut George R. Terry (2016) mengemukakan bahwa fungsi-fungsi manajemen ini terdiri dari: proses perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) serta pengawasan (*controlling*). Dengan begitu dalam aktivitas tentu diawali dengan sebuah perencanaan, termasuk dalam manajemen pembangunan. Hal ini dikarenakan melalui perencanaan akan menentukan tindakan apa saja yang akan dijalankan selanjutnya. Dalam manajemen fungsi perencanaan merupakan hal yang paling mendasar, mengingat fungsi-fungsi manajemen yang lainnya sudah tentu dipikirkan dengan cermat terlebih dahulu melalui proses perencanaan yang dilakukan secara komprehensif. Ini berarti bagaimana fungsi-fungsi manajemen tersebut berjalan dengan baik atau tidak tergantung kepada ketepatan perencanaan yang dirumuskan sebelumnya.

c. Evaluasi Program

Wahab dalam Adzhani (2019) menjelaskan bahwa program adalah suatu kegiatan pemerintah yang mempunyai batasan yang cukup jelas dan relatif khusus. Selain itu program juga menjadi suatu realisasi dari kebijakan yang prosesnya berkesinambungan dan melibatkan orang banyak (Adzhani, 2019). Program dapat menjadi turunan dari kebijakan yang dirumuskan pemerintah guna menggapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi menjadi suatu kegiatan dalam menilai kinerja dalam suatu kebijakan atau program. Dalam konsep manajerial evaluasi dijadikan suatu usaha yang dilakukan secara objektif untuk menilai hasil pencapaian dari hal yang sebelumnya telah ditetapkan (Abdoellah dan Rusfiana, 2016). Evaluasi juga didefinisikan sebagai kegiatan dalam menilai program atau kebijakan yang sudah disusun dan dilaksanakan sebagai bentuk perbaikan kepada program atau kebijakan ke depannya (Yofita & Jumiati, 2019).

Terdapat suatu indikator tertentu dalam mengukur evaluasi kebijakan atau program. Indikator sendiri menjadi suatu hal yang dapat menjadi petunjuk atau keterangan. Bridgman dan Davis (2000) mengemukakan pengukuran evaluasi kebijakan atau program mengacu kepada empat indikator secara umum yaitu terkait dengan indikator *input*, indikator *process*,

indikator *outputs*, dan indikator *outcomes*.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Merujuk pada Creswell dalam (dalam Kusumastuti & Khoiron, 2019) menjelaskan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang ditujukan untuk menjelajahi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari permasalahan sosial. Selanjutnya, pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mana penelitian ini mengarah untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani, 2020).

Melalui penelitian ini peneliti berusaha untuk menggambarkan ataupun mendeskripsikan manajemen pembangunan dan permasalahan yang menjadi penyebab faktor penghambat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cening, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Selain itu di dalam penelitian ini peneliti juga berusaha untuk menjelaskan bagaimana solusi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal untuk mengatasi mengatasi hambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cening, Kabupaten Kendal. Data didapat dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Desa Cening

Perencanaan merupakan salah satu tahapan yang penting dalam melaksanakan suatu pembangunan karena hal ini akan berkaitan dengan langkah-langkah yang akan diambil dan tidak diambil dalam suatu proses pembangunan. Hal ini pada dasarnya dilaksanakan agar suatu program pembangunan dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efisien, terarah, dan tepat melalui sumber daya yang telah tersedia. Begitu pula yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan perencanaan pembangunan ruas jalan di Desa Cening, Kecamatan Singorojo. Perencanaan pembangunan ini dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ruas jalan kabupaten di Desa Cening yang mengalami kerusakan selama kurang lebih 30 tahun ini. Yang mana ruas jalan tersebut memiliki status sebagai jalan kabupaten sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor 620/374/2020 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten Kendal.

Perencanaan pembangunan ruas jalan Desa Cening ini setidaknya sudah mulai direncanakan pada akhir tahun 2021. Nantinya penyelesaian permasalahan rusaknya jalan di Desa Cening ini akan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini merupakan pendanaan yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu dalam rangka untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan apa yang menjadi prioritas

nasional. Dalam perencanaan ini terdapat berbagai pihak yang ikut serta terlibat. Pihak yang terlibat terutama ialah Pemerintah Desa Cening dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Akan tetapi secara teknis Pemerintah Desa Cening menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal melibatkan pihak lain yaitu konsultan. Berkaitan dengan hal tersebut pihak konsultan perencana yang digandeng oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal untuk membuat perencanaan proyek infrastruktur jalan di Desa Cening ialah CV. Citra Rekayasa.

Setelah tahap perencanaan tersebut selesai dilakukan, selanjutnya pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal melaporkan atau mengirimkan draf perencanaan ini kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satker P2JN (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional) untuk dilakukan verifikasi oleh kedua belah pihak tersebut. Dalam hal ini bidang dalam Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional yang melakukan verifikasi ialah Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ). Setelah tim dari Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional selesai dalam melakukan verifikasi menyetujui data dan dokumen perencanaan pembangunan tersebut, setelah itu DPUPR Kabupaten Kendal membawa data dan dokumen perencanaan tersebut kepada pihak lain lagi. Dalam hal ini data dan dokumen perencanaan dilaporkan kepada Pusat Fasilitas Infrastruktur Daerah (PFID)

yang berada dalam naungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya baru dapat melaksanakan lelang proyek.

Pengorganisasian Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Desa Cening

Pengorganisasian atau *organizing* menjadi salah satu fungsi yang penting. Di mana pada tahap ini difokuskan pada penataan struktur, sumber daya, penugasan, serta tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Pengorganisasian ini menjadi salah satu kunci yang menentukan keberhasilan dari manajemen terutama dalam kaitan pembangunan. Melalui pengorganisasian ini memiliki manfaat yang signifikan yang mana dapat membantu dalam memudahkan koordinasi antar anggota tim.

Pembagian tim proyek pembangunan infrastruktur jalan Biting-Cening sendiri dilakukan oleh DPUPR Kabupaten Kendal. Hal ini dikarenakan pihak DPUPR Kabupaten Kendal sendiri merupakan pihak pemilik proyek yang mana menjadi badan hukum yang memiliki proyek dan penyediaan dana untuk merealisasikan proyek. Pihak pemilik proyek sendiri memiliki tugas dan kewajiban seperti dalam penyediaan dana yang diperlukan dalam proyek, menunjuk kontraktor pemenang tender untuk menjalankan proyek, dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan pihak kontraktor.

Dalam urusan pengerjaan proyek nantinya diserahkan kepada PT. Budi Taraka selaku kontraktor pelaksana yang sebelumnya telah memenangkan proses

lelang atau tender proyek terlebih dahulu. Kontraktor pelaksana sendiri merupakan badan hukum/perorangan yang dipilih menjadi pelaksana dalam pekerjaan proyek yang berdasar keahlian masing-masing. Selain itu kontraktor pelaksana juga bertanggung jawab secara langsung terhadap pemilik proyek untuk menjalankan pekerjaan proyek yang diawasi oleh pemilik proyek dan pengawas. Selain itu juga terdapat konsultan pengawas yang dipegang oleh CV Wastu Anopama. Konsultan pengawas sendiri adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan pengawasan utama dalam pelaksanaan proyek agar sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Pihak konsultan pengawas juga bertugas untuk mengawasi secara menyeluruh agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses pengerjaan proyek.

Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Desa Cening

Kondisi kerusakan ruas jalan Biting-Cening yang menjadi penghubung antara wilayah Kecamatan Limbangan dengan Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal akhirnya mulai diperbaiki. Perbaikan ini dimulai untuk dikerjakan pada awal bulan Juni 2022. Setidaknya dalam proses perbaikan ini akan memperbaiki ruas jalan sepanjang 3,9 kilometer yang mengalami kerusakan parah.

Gelontoran anggaran sebesar 7 miliar rupiah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk memperbaiki ruas jalan Biting-Cening yang berada dalam kondisi rusak. Perbaikan jalan pada tahap ini, utamanya dikerjakan di wilayah Desa Cening,

Kecamatan Singorojo dan sedikit titik di Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan. Selain melakukan perbaikan jalan. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) juga melakukan penanganan pada aspek-aspek sarana dan prasarana jalan seperti melakukan penanganan pada daerah longsor, pembangunan talut jalan, dan pembangunan jembatan.

Dalam proses pembangunan ruas Jalan Biting-Cening ini proses pengerjaan diserahkan kepada PT. Budi Taraka selaku kontraktor proyek melalui proses lelang terlebih dahulu. Tenaga kerja yang dipekerjakan di dalam proyek pembangunan ruas jalan Biting-Cening ini diambil dari masyarakat yang tinggal di sekitaran Desa Cening. Proses pengerjaan proyek pembangunan ruas jalan Biting-Cening ini dimulai pada tanggal 3 Juni 2022 dan direncanakan akan selesai dibangun pada 30 November 2022.

Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Desa Cening

Pengawasan dalam pembangunan ruas jalan Biting-Cening selain dilakukan oleh pihak konsultan pengawas CV Wastu Anopama juga dilakukan oleh pihak DPUPR Kabupaten Kendal itu sendiri. Di tengah pelaksanaan pembangunan ruas jalan Biting-Cening ini setidaknya ditemui beberapa permasalahan yang kemudian menjadi hambatan tersendiri terhadap keberjalanan proyek. Salah satunya yaitu terkait dengan bencana alam tanah longsor yang terjadi di tengah-tengah keberjalanan proyek pembangunan infrastruktur jalan ini.

Permasalahan tersebut menyebabkan adanya ruas jalan sepanjang 50 meter yang harus ditinggal dalam pengerjaannya. Hal ini dikarenakan ruas jalan tersebut membutuhkan penanganan khusus karena berlokasi di titik yang rawan akan bencana tanah longsor. Dana yang menjadi pagu anggaran pada waktu itu juga tidak mencukupi untuk membangun ruas yang terdampak tersebut, sehingga akan dibiayai dengan anggaran yang berbeda di kemudian hari. Dengan adanya permasalahan tanah longsor ini membuat proyek pembangunan ruas jalan Biting-Cening belum selesai 100% pada tanggal selesai yang ditetapkan yaitu pada 30 November 2022.

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten di desa Cening

1. Input

Aspek pertama dalam penelitian ini yaitu berupa indikator input. Di mana pada aspek ini terdapat sumber daya manusia dan sumber daya finansial sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Dalam proses pembangunan ruas jalan Biting-Cening menurut keterangan pihak DPUPR Kabupaten Kendal terdapat beberapa oknum masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini demi keuntungan. Terdapat beberapa oknum masyarakat yang meminta ganti rugi akan tanah yang akan digunakan sebagai jalan. Padahal pada dasarnya masyarakat tidak memiliki hak atas tanah tersebut, namun tanah tersebut sudah terlanjur dimanfaatkan masyarakat sebelumnya sehingga meminta

ganti rugi kepada pihak DPUPR Kabupaten Kendal. Hal tersebut tentunya mengganggu kelancaran pekerjaan proyek sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun di sisi lain terdapat banyak masyarakat yang mendukung proyek pembangunan jalan Desa Cening ini. Hal ini dikarenakan pembangunan jalan merupakan hal yang sangat didambakan oleh masyarakat Desa Cening sejak lama.

Selanjutnya terkait dengan sumber daya finansial. Seperti halnya yang terjadi di dalam pembangunan ruas jalan Biting-Cening tahun 2022-2023. Dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan tersebut terdapat sepanjang 50 meter ruas jalan yang ditinggal dalam pengerjaannya. Hal tersebut dikarenakan titik ruas jalan tersebut memerlukan penanganan yang istimewa dibandingkan dengan panjang ruas jalan yang lainnya. Dalam hal tersebut pendanaan yang telah menjadi pagu anggaran dalam perencanaan pada waktu itu tidaklah mencukupi untuk membangun titik ruas jalan yang memerlukan penanganan istimewa tersebut. Karena pada perencanaan awal hal ini dianggap bukanlah masalah sehingga tidak masuk di dalam penganggaran. Akan tetapi di saat proses pembangunan berjalan hal ini menjadi masalah tak terduga yang muncul.

Dengan begitu sepanjang titik ruas jalan tersebut melalui kesepakatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal,

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Inspektorat Kabupaten Kendal pun menyepakati bahwa segmen sekitar 50 meter ruas jalan tersebut untuk ditinggal terlebih dahulu dalam pengerjaannya. Yang mana selanjutnya panjang ruas jalan yang ditinggalkan pengerjaannya ini akan ditangani melalui dana darurat dari belanja tidak terduga.

2. Process

Indikator *process* ini berfokus pada penilaian bagaimana suatu program ditransformasikan dalam bentuk realisasi langsung. Seperti halnya dalam pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur jalan juga ditemui beberapa kendala teknis yang menghambat proses pembangunan. Salah satu hal yang menjadi kendala tersendiri dalam proyek pembangunan ruas jalan Biting-Cening ini ialah bencana alam. Bencana tanah longsor umum terjadi di Desa Cening ini terutama pada musim hujan, hal ini terjadi karena letak Desa Cening sendiri secara geografis berada di sekeliling perbukitan. Dengan adanya bencana tanah longsor di waktu pelaksanaan proyek pembangunan ruas jalan Biting-Cening ini mengakibatkan adanya titik ruas yang ditinggal pengerjaannya.

3. Outputs

Indikator *output* atau hasil ini difokuskan kepada penilaian hasil atau produk yang bisa dihasilkan dari suatu program yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ruas infrastruktur jalan yang berhasil dibangun yaitu

merupakan ruas jalan Biting-Cening. Jalan ini dibangun dengan panjang 3,9 kilometer. Di mana jalan ini menjadi penghubung antara Desa Cening untuk bermobilisasi ke arah Kecamatan Limbangan di bagian timur.

Ruas infrastruktur jalan Biting-Cening ini dibangun dengan jenis beton bermutu K350. Jenis mutu beton ini digunakan seperti jalan kabupaten pada umumnya. Jenis beton ini dikategorikan sebagai beton kelas menengah atas. Mutu beton jenis ini memiliki ketebalan minimum sebesar 25 cm. Di mana dengan menggunakan tipe beton tersebut dapat menahan beban sebesar 350 Kg/cm^2 , dengan harapan infrastruktur jalan Biting-Cening yang telah dibangun dapat bertahan lama.

4. Outcomes

Indikator keempat dalam penelitian ini berupa *outcomes*. Dimana ini difokuskan kepada dampak yang diterima oleh masyarakat luas ataupun pihak yang terkena atau terdampak program pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Dengan dibangunnya infrastruktur jalan di Desa Cening terutama ruas jalan Biting-Cening ini masyarakat merasa terbantu. Pembangunan jalan merupakan hal atau mimpi yang sudah lama didambakan masyarakat Desa Cening. Hal ini dikarenakan mereka sudah mengalami akses keluar masuk Desa Cening yang dalam keadaan rusak parah selama kurang lebih 30 tahun ini. Setidaknya dengan dibangunnya ruas jalan tersebut

kegiatan masyarakat sehari-hari dapat menjadi lebih mudah dan lancar. Melalui ruas jalan Biting-Cening yang telah dibangun, masyarakat dapat dengan mudah melakukan mobilitas ke wilayah sekitar seperti ke Kecamatan Limbangan dan Kecamatan Boja.

Solusi untuk Mengatasi Hambatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten di Desa Cening

1. Dana Darurat dari Belanja Tidak Terduga

Dengan adanya kejadian tidak terduga berupa bencana tanah longsor di salah satu titik ruas di Jalan Biting-Cening memerlukan penanganan yang khusus. Akan tetapi pada saat itu pendanaan yang ada tidak mencukupi apabila dipergunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan begitu menyebabkan salah satu titik sepanjang 50 meter yang mengalami bencana tanah longsor ini ditinggalkan terlebih dahulu pembangunannya menunggu pendanaan yang lain.

Dengan keadaan demikian maka titik yang mengalami bencana tanah longsor tersebut didanai sendiri untuk penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Kendal melalui dana darurat dari Belanja Tidak Terduga. Belanja tidak terduga sendiri merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Pendanaan tersebut dialokasikan untuk membangun talud pengaman dan *bore pile* di ruas Jalan Biting-Cening yang rawan mengalami bencana tanah longsor. Jumlah anggaran untuk mengatasi permasalahan tersebut sebesar 1,3 miliar rupiah.

2. Bantuan dari BPBD Kabupaten Kendal

Penanganan titik di ruas jalan Biting-Cening yang mengalami bencana tanah longsor sepenuhnya didanai oleh BPBD Kabupaten Kendal. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah dalam penanganan bencana alam di Kabupaten Kendal. BPBD Kabupaten Kendal berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk menyalurkan belanja tidak terduga untuk penanggulangan bencana di Desa Cening. Hal ini dikarenakan anggaran tersebut yang dapat menggunakan hanya pihak BPBD Kabupaten Kendal. Dana tersebut disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk mengatasi kegiatan-kegiatan yang tidak terduga sebelumnya. Dana ini kemudian digunakan untuk membangun dinding penahan atau talud untuk mencegah terjadinya kembali tanah longsor di salah satu titik ruas Jalan Biting-Cening. Pengampu kegiatan penanganan titik di ruas jalan Biting-Cening tersebut merupakan pihak dari BPBD Kabupaten Kendal, namun pada pelaksanaannya tetap

dikerjakan oleh pihak penyedia jasa.

3. Penggunaan Dana Alokasi Khusus

Pembangunan ruas jalan Biting-Cening menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendanaan tersebut berasal dari Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada pemerintah daerah untuk dipergunakan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan daerah namun juga masih dalam prioritas nasional. Penggunaan Dana Alokasi Khusus ini dapat menjadi suatu jalan keluar dari minimnya anggaran daerah yang digunakan untuk membangun infrastruktur.

Pembangunan ruas Jalan Biting-Cening ini dapat mendapat anggaran dari Dana Alokasi Khusus karena masih sejalan dengan program prioritas nasional. Hal tersebut kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. DAK ini digunakan juga dalam rangka pemerataan pembangunan antar daerah. Melalui penggunaan DAK dapat membantu daerah-daerah yang mempunyai kemampuan fiskal yang terbatas dalam melakukan pembangunan.

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Desa Cening dilakukan DPUPR Kabupaten Kendal dengan CV Citra Rekayasa selaku konsultan perencana, selanjutnya dilaporkan kepada instansi terkait. Dalam

pengorganisasian terdapat 3 pihak yaitu DPUPR selaku pemilik proyek, PT Budi Taraka selaku kontraktor proyek, dan CV Wastu Anopama selaku pihak konsultan pengawas. Pelaksanaan pembangunan dimulai pada Juni 2022 dengan menggunakan dana sebesar 7 miliar dari DAK. Pelaksanaan proyek pembangunan ini dipegang oleh PT Budi Taraka selaku kontraktor proyek. Dalam Pengawasan ini ditemui beberapa permasalahan yang kemudian menjadi hambatan tersendiri terhadap keberjalanan proyek terutama terkait dengan bencana alam.

Kaitannya dalam evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Desa Cening beserta hambatan dalam proses pembangunan infrastruktur jalan kabupaten di Desa Cening adalah sebagai berikut. *Input*, Dalam proses pembangunan ruas jalan Biting-Cening terdapat beberapa oknum masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini demi keuntungan pribadi. Beberapa oknum masyarakat meminta ganti rugi akan tanah yang akan digunakan sebagai jalan. Permasalahan sumber daya finansial memegang peran yang penting dalam proses pembangunan ruas jalan di Desa Cening. Tanpa adanya sumber daya finansial yang memadai maka proses pembangunan ruas jalan di desa tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. *Process*, Permasalahan teknis ini mengarah kepada beberapa tantangan atau masalah terkait dengan aspek teknis yang ditemui di lapangan. Kendala teknis yang dialami pada saat pembangunan infrastruktur jalan di Desa Cening lebih mengarah ke faktor lokasi dan kondisi alam. *Outputs*, Ruas infrastruktur jalan kabupaten yang berhasil dibangun yaitu merupakan ruas jalan Biting-Cening. Jalan

ini dibangun dengan panjang 3,9 kilometer. Di mana jalan ini menjadi penghubung antara Desa Cening untuk bermobilisasi ke arah Kecamatan Limbangan di bagian timur. Ruas jalan ini dibangun dengan jenis mutu beton K350. *Outcomes*, Dengan dibangunnya infrastruktur jalan di Desa Cening terutama ruas jalan Biting-Cening ini masyarakat merasa sangat terbantu. Setidaknya dengan dibangunnya ruas jalan tersebut aktivitas mobilisasi masyarakat dapat berjalan dengan lebih lancar dan baik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas, dirasa perlu rekomendasi terkait langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menuju keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Cening pada khususnya dan di Kabupaten Kendal pada umumnya. Adapun langkah yang mungkin bisa ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Cening dirasa perlu untuk melaporkan kembali dan menanyakan terkait kabar kepastian pembangunan ruas jalan Cening-Kaliputih kepada pihak Pemerintah Kabupaten Kendal dan DPUPR Kabupaten Kendal. Mengingat ruas jalan tersebut masih berada dalam kondisi rusak. Sehingga nantinya pembangunan jalan tersebut dapat terealisasi dengan segera.
2. Pemerintah Kabupaten Kendal harus lebih giat lagi untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan yang masih tersisa.

Mengingat di Kabupaten Kendal masih terdapat beberapa ruas jalan Kabupaten yang berada dalam kondisi rusak. Langkah ini harus dengan segera ditempuh demi kenyamanan dan kelancaran mobilitas dari masyarakat.

3. DPUPR Kabupaten Kendal dirasa perlu untuk menjaga kesiapan dalam menjawab setiap laporan masyarakat terkait jalan rusak di wilayah Kabupaten Kendal dan juga berusaha menanggulangnya dengan segera walaupun dengan penanganan sementara terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzhani, S. A. (2019). Evaluasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Studi Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Bridgman, J & Davis G. 2000. Australian Policy Handbook, Allen & Unwin, NSW
- Darmawan, A. (2018). Pembangunan Sarana Dan Prasarana Transportasi Desa Di Desa Terisolir. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* 8.1, 79-97.
- Kusuma, W. D. (2019). Pengaruh Infrastruktur Ekonomi dan Sosial dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, 114-130.
- Marzuki. (2007). *Pengaruh Infrastruktur Jalan Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Universitas Indonesia.
- Prayitno, E. (2021, November 19). *Terkendala Anggaran, Perbaikan Jalan Rusak Kendal Sisakan 100 Kilometer*. Dipetik September 20, 2022, dari AyoSemarang: <https://www.ayosemarang.com/semarang-raya/pr-771728952/terkendala-anggaran-perbaikan-jalan-rusak-kendal-sisakan-100-kilometer>
- Saksono, H. (2019). Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Penelitian dan Pengembangan dan Desain & Inovasi. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 213–226.
- Sari, Yofita, and Jumiati Jumiati. "Evaluasi Berjalan terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) di Kota Padang." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, vol. 1, no. 3, Sep. 2019.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan (Konsep, Teori, dan Strateginya)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suriani, & Keusuma, C. N. (2015). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Dasar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 1*, 1 -18.
- Syahza, A. (2002). Potensi Pengembangan Desa Tertinggal dan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bengkalis - Riau. *Jurnal Kependudukan, Vol 4 No.2*.
- Terry, G. R. (2016). *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tjokroamidjojo, B. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.